



<http://www.ministrylive.org/index.php/>

Tentang A+ CSR Indonesia

A+ CSR Indonesia hadir sebagai *social enterprise* yang menghimpun berbagai keahlian profesional dalam isu-isu seputar CSR. Dengan keahlian itu, berbagai permasalahan yang ada dalam pelaksanaan CSR dapat diidentifikasi dengan tepat dan peluang bagaimana melakukan perbaikan atasnya dapat direkomendasikan. Di sisi lain A+ juga menghimpun keahlian yang sama untuk memajukan konsep CSR yang substansial, agar khalayak dapat membedakannya dengan upaya menggunakan konsep tersebut untuk kepentingan di luar pembangunan berkelanjutan. A+ bertekad menjaga keseimbangan antara kritisisme terhadap kinerja sosial dan lingkungan perusahaan dengan optimisme rasional untuk perbaikannya.

CSR Indonesia Newsletter

Redaksi

Jalal (jalal.csri@yahoo.com)

Taufik Rahman (rahman.taufik@gmail.com)

Irpan Kadir (irpan.kadir@gmail.com)

Reza Ramayana (reza.ramayana@gmail.com)

Endro S. (muhammad.endro.sampurna@gmail.com)

Fajar Kurniawan (fajar_k2001@yahoo.com)

Anita Setyorini (anita_setyorini@yahoo.com)

Adhisatia (adhisatia@gmail.com)

Website & Publikasi (media@csrindonesia.com)

Alamat Jl Danau Sentani No. 9 Duta Pakuan, Bogor Jawa Barat 16114; Telpon: +62 251 8336349

Daftar Isi

2 Editorial

Ketika Harus Memilih Ekonomi atau Lingkungan CSR Memang Tidak Cukup dengan Bagi-bagi Sembako

4 Berita CSR

10 Publikasi A+

CSR Tidak Cukup dengan Investasi Sosial Gusur Paksa Atas Nama Negara

14 Artikel Pilihan

Asia's New Free Trade: Risks and Opportunities for CSR

Why the Triple Bottom Line Matters More Than Ever

Dari Redaksi

Awal tahun 2010 perjalanan masyarakat Indonesia kembali dihadapkan pada gejolak politik yang memenuhi ruang pemberitaan media massa setiap harinya. Kasus Bank Century rasanya layak dikedepankan sebagai pemberitaan politik yang cukup menguras energi para politisi negeri ini di antara isu ekonomi politik lainnya. Isu yang kental dengan nuansa politik, hukum maupun kekeliruan keputusan atas bisnis ternyata cukup kencang menggoyang kredibilitas rezim politik yang tengah berkuasa di negeri ini.

Belum lagi isu skandal Bank Century mereda, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan pemberlakuan CAFTA (*China-ASEAN Free Trade Agreement*). Konsekuensi yang kentara akibat perjanjian ini adalah semakin membanjirnya barang-barang produksi Cina dengan harga yang lebih miring ketimbang buatan dalam negeri. Di sisi lain ancaman bagi operasional ribuan UMKM di Indonesia dan diikuti dengan putusan PHK akan semakin menggelayuti perekonomian negeri ini. Atas kekhawatiran tersebut, para ekonom mempermasalahkan ketidaksiapan pemerintah untuk menyambut CAFTA.

Atas ragam dinamika tersebut, merupakan tantangan tersendiri bagi para pelaku ekonomi di Indonesia untuk mampu bertahan maupun tumbuh di tengah gejolak yang ada. Dalam edisi kali ini, esai yang disajikan Richard Welford, *Asia's New Free Trade: Risks and Opportunities for CSR*, kian menajamkan urgensi atas pilihan kebijakan CSR bagi seluruh entitas bisnis di Asia Tenggara. Ide efisiensi energi, tata kelola perusahaan dengan baik, dan efisiensi biaya operasional merupakan gagasan CSR yang dinyatakan seorang pemerhati CSR yang sangat terkemuka tersebut.

Pilihan tersebut dirasa lebih arif ketimbang melakukan pemutusan hubungan kerja dan gulung tikar perusahaan. Semangat CSR guna mewujudkan penyediaan lapangan kerja dan perwujudan kesejahteraan yang lebih merata akan sulit mengejawantah bila kebijakan negatif banyak dipilih oleh pengusaha dalam menyikapi dinamika global saat ini.

Dalam edisi ini, untuk kesekian kalinya Lingkar Studi CSR mempromosikan bahwa kebijakan CSR substansial tidak sekadar aktivitas karitas semata—seperti juga yang dinyatakan oleh Wapres Boediono. Melalui editorial kali ini, pengelolaan dampak inti atas kegiatan perusahaan dan upaya kontribusi perusahaan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan tetap merupakan gagasan dasar CSR arus utama, yang turut didorong oleh Lingkar Studi CSR.

Salam lestari, selamat membaca!

Green Ads Space

Untuk mengiklankan produk yang ramah sosial dan lingkungan, *sponsorship*, *link* ke laporan CSR perusahaan, agenda kegiatan CSR (pelatihan, seminar, lokakarya, ekspo) atau lainnya yang relevan silakan kontak ke media@csrindonesia.com.

Ketika Harus Memilih Ekonomi atau Lingkungan

1 Februari 2010

Sepanjang minggu terakhir Januari 2010 yang lalu, beberapa surat kabar nasional dan portal berita, mengangkat *headline* mengenai kerusakan lingkungan sebagai dampak negatif dari aktivitas pertambangan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Dilihat dari muatan berita, memang hal tersebut bukanlah isu baru, tapi isu lama yang tidak kunjung mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang komprehensif, sehingga eskalasi masalahnya menjadi semakin meluas dan mencapai taraf yang meresahkan sebagian besar pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan yang resah tersebut tidak hanya dimonopoli oleh kalangan aktivis LSM, tapi sudah menjangkau kalangan masyarakat, akademisi dan bahkan pemerintah di tingkat lokal dan pusat.

Kondisi di atas menunjukkan betapa karut marutnya pengelolaan sumberdaya alam di negeri ini. Betapa tidak, dalam kurun waktu enam tahun (sampai 2009) di Kalimantan saja telah terbit 2.047 kuasa pertambangan dan diperkirakan mengokupasi lahan seluas 4,09 juta hektar, dan tentunya angka itu akan semakin besar jika ditambah dengan pertambangan ilegal. Euforia otonomi daerah telah menyebabkan para bupati/walikota yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan KP menjadi “gelap mata”. Kombinasi keinginan untuk meningkatkan PAD dan keinginan mendapatkan keuntungan jangka pendek untuk pribadi dan kelompok terbukti sangat dominan dalam mempercepat kerusakan lingkungan hidup. Namun, sesungguhnya persoalannya tidak sesederhana itu, tapi merupakan akumulasi dari kesalahan-kesalahan dalam tataran paradigmatik pengelolaan sumberdaya alam.

Salah satunya adalah perseteruan antara motif ekonomi dan motif lingkungan dalam pembangunan Indonesia yang tidak kunjung selesai. Dan masing-masing pihak memiliki pendirian dan beragam alasan untuk mendukung kebijakan yang diambilnya. Kalangan *economist* beralasan bahwa investasi di sektor sumberdaya alam, khususnya pertambangan akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daerah setempat, melalui investasi yang ditanamkan. Sementara kalangan *environmentalist* berpendapat, tidak seharusnya kita mengorbankan masa depan kita dengan merusak sumberdaya alam, hanya demi kepentingan ekonomi jangka pendek. *Toh* sebenarnya masih banyak cara kreatif untuk mengeksploitasi sumberdaya alam, tanpa merusak eksistensi sumberdaya itu sendiri. Memang perbedaan pendirian dalam tataran paradigmatik

dan ketidakjelasan pilihan kebijakan pemerintah telah menggiring lahirnya peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum di bawahnya, yang tidak jelas. Sehingga tidak heran kemudian terjadi perseteruan yang tak kunjung usai, misalnya antara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Karena satu pihak menjadikan azas ekonomi sebagai pijakan pengambilan kebijakan publik, sementara pihak yang lain menjadikan azas kelestarian lingkungan sebagai pijakannya.

Kesalahan lainnya adalah diadopsinya pengelolaan sumberdaya alam dengan pola *corporate based management* yang telah menjadikan pemilik modal sebagai pelaku utama dalam eksplorasi sumberdaya alam dan menjadikan barang tambang tak lebih dari sekedar komoditas yang tidak mempunyai nilai strategis. Kondisi ini memungkinkan semua pihak yang mempunyai modal untuk masuk sebagai “pemain”, baik itu dalam skala kecil maupun besar. Sementara negara hanya memerankan dirinya sebagai “penjual izin” sembari menunggu pemasukan pajak dan royalti yang besarnya tidak seberapa. Padahal agar bisa menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, negara tidak boleh hanya bersikap pasif dalam pengelolaan sumberdaya alam, tapi harus aktif mengelola, mengontrol dan mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat. Pola *state based management* kiranya menjadi pola yang lebih ideal, karena memungkinkan negara untuk memegang kendali lebih besar terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan menempatkan barang tambang sebagai komoditas yang bernilai strategis, yang tidak bisa diobral sedemikian murah oleh siapa saja.

Memang tidak mudah merubah paradigma pengelolaan sumberdaya alam di negara sekaya Indonesia, apalagi dalam kondisi pemerintahan yang dihegemoni oleh pandangan neoliberal seperti saat ini dan pola yang sudah berjalan berpuluh tahun lamanya. Namun, patut kiranya kita merenungkan kembali pandangan Herman Daly berikut, “*without functioning economic systems, societies cannot advance; without functioning social systems, people cannot develop; but without functioning natural systems, everything collapses*”. Jika kita memahami dengan baik pandangan tersebut, niscaya kita tidak perlu lagi kebingungan apakah motif ekonomi yang harus didahulukan dan kelestarian lingkungan yang harus dikorbankan atau sebaliknya.

CSR Memang Tak Cukup dengan Bagi-bagi Sembako

25 Januari 2010

Jumat 22 Januari 2010 lalu, Wapres Boediono dalam kesempatan membuka acara pemberian penghargaan kepada wirausahawan muda yang difasilitasi oleh Bank Mandiri menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri adalah “CSR yang substansial,” dan Beliau mengingatkan bahwa banyak perusahaan yang masih melakukan “CSR” dengan jalan membagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako, menurut Wapres, adalah hal yang baik, namun dipandang tidak memadai sebagai CSR.

Wapres benar. CSR memang jauh lebih kompleks daripada bagi-bagi sembako. CSR, sebagaimana disepakati oleh banyak pakar, dalam definisi arus utama berarti internalisasi atau manajemen dampak. Itu artinya, perusahaan musti tahu persis apa saja dampak operasionalnya, baik yang positif maupun negatif, lalu mengelolanya. Yang positif tentunya dimaksimalkan, sementara yang negatif diminimumkan. Dan, bagi-bagi sembako jelas tidaklah cukup sebagai maksimisasi dampak positif maupun minimisasi dampak negatif, bukan?

Tetapi, apakah juga memfasilitasi usahawan muda adalah bentuk CSR yang memadai bagi Bank Mandiri? Berbagai pakar telah menuliskan bahwa CSR yang sesuai dengan industri perbankan pada dasarnya ada tiga: penapisan investasi dengan memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan, promosi *financial literacy* dan perlakuan khusus untuk UMKM. Nah, dengan program wirausahawan muda tersebut, tampaknya dua yang terakhir telah masuk. Bagaimanapun, Bank Mandiri harus memberikan pengetahuan mengenai berbagai aspek finansial kepada para wirausahawan tersebut. Sebagai pemula, wirausahawan itu juga tentunya adalah bagian dari UMKM—karena mereka mustahil langsung menjadi pengusaha besar.

Pertanyaan yang tersisa adalah apakah Bank Mandiri telah melakukan penapisan investasinya dengan mengadopsi atau mengadaptasi kerangka Equator Principles dan IFC Performance Standards? Hingga sekarang tampaknya belum. Adopsi jelas belum, karena Bank Mandiri hingga sekarang belum lagi tercatat sebagai penanda tangan Equator Principles.

Adaptasi? Tak bisa diketahui dengan pasti hingga di mana, karena Bank Mandiri tak pernah mengungkapkan hal tersebut di muka publik.

Bank Mandiri memang pernah beberapa kali menyatakan bahwa dalam menapis investasi mereka melihat apakah sebuah projek memiliki AMDAL. Namun, apakah ini memadai? Jelas tidak. Boleh jadi sebagian besar projek yang didanai oleh Bank Mandiri adalah projek yang wajib AMDAL. Namun demikian, mempersyaratkan adanya dokumen AMDAL tentu saja tidak memadai. Banyak orang tahu bahwa dokumen AMDAL di Indonesia sebagian sangat besarnya bermutu jelek. Padahal apabila AMDAL kita dibuat dengan sangat baikpun, itu tak memadai kalau dibandingkan dengan mutu dokumen *Environmental and Social Impact Assessment* yang diminta oleh IFC. Pemerintah agaknya menyadari itu sepenuhnya, sehingga UU 32/2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-pun kemudian memperbaiki persyaratan AMDAL dengan tambahan analisis risiko lingkungan, juga persyaratan yang ketat bagi pembuat dan penilaiannya.

Apakah mengikuti Equator Principles dan IFC Performance Standards itu sudah memadai? Norma di dunia bisnis tampaknya begitu. Namun, perlu diingat bahwa dunia bisnis tidaklah vakum, melainkan diisi oleh norma-norma pemangku kepentingan. Equator Principles banyak dikritik LSM karena membatasi jumlah investasi yang ditapis, yaitu bagi investasi di atas USD 10 juta. Padahal, investasi di bawah itupun banyak yang membawa dampak sosial dan lingkungan yang luar biasa. IFC Performance Standards yang menyatakan bahwa PIFC adalah *prior and informed consultation* dipandang tak memadai oleh LSM karena seharusnya PIFC bermakna *prior and informed consent*.

Jadi, memang bagi-bagi sembako itu tak memadai sebagai CSR. Tapi, melakukan banyak hal di luar bagi-bagi sembako itu juga belum tentu sudah memadai. Bahkan ketika norma di dunia bisnis sudah menganggapnya memadai, pemangku kepentingan belum tentu sependapat.

Ecotourism Exempted from Amdal Permit

28 Januari 2010

Sumber: <http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/28/ecotourism-exempted-amdal-permit.html>

Investors can now develop a conservation forest into an ecotourist destination without carrying out a study on its impact on the environment, as part of the government's latest policy to relax bureaucracy. The decision was made when many conservation forests were converted into palm oil plantations or mining fields, as had occurred in Kalimantan.

The Forestry Ministry and State Environment Ministry agreed to revise the 1990 government regulation on tourism in an effort to lure investors to develop ecotourism across the country. "We agree to drop the requirement for Amdal documents for investors who are interested in developing ecotourism in conservation forests," Darori, director general of forest protection at the Forestry Ministry told The Jakarta Post on Wednesday. The revised government regulation is due this month.

He said that the money generated from the business would be used to fund conserving forests and help improve locals' income. Darori said that developers were prohibited from building infrastructure and other facilities that would damage the environment. "There will be no asphalt roads and cement buildings in the ecotourism sites," he said.

The permits to transform the conservation forest into ecotourist sites were issued by the Forestry Ministry. The authority to issue the Amdal document, which was aimed to assess whether activities could harm the environment, lies with the State Environment Ministry. Deputy for spatial planning at the State Environment Ministry Hermien Rosita said that ecotourism would not harm the environment. "Our assessment shows there is no significant impact and that's why we agreed to drop the Amdal requirement," she told the Post. She said that developers should instead implement the

environmental management scheme (UKL) and the environmental monitoring scheme (UPL). The 2009 Environmental Law requires that each business obliging to secure the UKL/UPL should secure the environmental permit issued by the State Environment Ministry. The decision to ease the regulations on ecotourism was also made as the State Environment Ministry promised to tighten the Amdal process to prevent further environmental degradation in the country, often blamed for major natural disasters.

Almost all forested provinces in the country have suffered annual floods in the wet season and water crisis in the dry season. Experts blamed the problem on poor forest management. The 1990 regulation stipulates the ecotourist sites be developed by cooperatives, individuals, the private sector or the government, with a total renting period of 30 years.

Kalimantan Seen as Perfect Test Case for New Green Law

28 Januari 2010

Sumber: <http://thejakartaglobe.com/nvironment/kalimantan-seen-as-perfect-test-case-for-new-green-law/355266>

It's the all too familiar good news-bad news story for the country's environment. The good news is the law to take down those involved in the destruction of the environment is in place and ready for action. The bad news is that the government does not seem particularly eager to use it. "We don't want the law to turn into another paper tiger," said Asep Warlan Yusuf, an environmental law expert at Bandung's Parahyangan University. "It's high time the government took some real action against environment offenders."

The State Ministry for the Environment, Asep said, "lacks the courage to fight the good fight by taking environmental cases to court." The Environmental Protection and Management Law became effective on Oct. 3, 2009.

Siti Maimunah, national coordinator of the Mining Advocacy Network (Jatam), said the government should immediately begin putting the law to work in Kalimantan, where the environment is in full retreat in the face of massive mining operations

and the spread of palm oil plantations. "You want this law to work, you start with Kalimantan," she said. "This would be a real test because the Kalimantan case is very urgent."

Siti said Kalimantan for years had been the scene of unchecked exploitation, as large companies dug up its coal and minerals, cut down its forests and created massive palm oil plantations. Siti said local administrations in Kalimantan had tried to contain the destruction with spatial planning,

which she described as little more than a "suicide plan."

"Kalimantan is staring at its own destruction because the development planning [of the various government departments] is a mess that concentrates on exploitation," she said. Kalimantan, she said, seems to have implemented "mismanagement planning." "Look at Samarinda [the capital of East Kalimantan]," she said. "The local government has been forced to spend billions of rupiah to build a canal to prevent massive floods caused by the coal industries surrounding the city."

East Kalimantan is home to 1,212 coal mining operations, permits for which were issued by local administrations as authorized under the Regional Autonomy Law. There are an additional 32 permits issued by the central government. In neighboring South Kalimantan, there are around 400 mining operations.

"[We] will check those mining operations this week and if there are any violations, we will not hesitate to review their permits and urge them to rehabilitate the areas," Zulkifli said. The minister was responding to a report in a national newspaper that around 200 mining concessionaires are operating in conservation areas in South

Kalimantan.

Environmental law expert Mas Achmad Santosa lauded the new law, but said the government needed to make immediate use of it to go after companies damaging the environment. "This law should help resolve the longstanding problem of departmental egoism," Santosa said. "Although this law is perceived to be solely the province of the State Ministry for the Environment, in fact, it can be used by other [government departments], such as the mining and forestry [ministries]." "[The other ministries] don't need further education or information on the law, they should be able to jump right in. However, the State Ministry for the Environment should be the one to make the breakthrough."

Santosa said the new law no longer dealt only with "brown issues," that is only toxic chemical pollution, but had been expanded to deal with "green issues" linked to forestry and other sectors. "Compared to other laws this is a strong one, especially for Kalimantan because it defines corporate crimes, introduces a more integrated monitoring system through clauses in the operation permits and even has a back-up control from the district to the central level [of the government]," he said.

Asked to comment on demands by activists that the law be deployed immediately, State Minister for the Environment Gusti Muhammad Hatta said he had already instructed his staff to carry out an inventory of the mining activities in Kalimantan and to compose a government regulation to accompany the new law. "[The mining operators] will be punished according to their level of non-compliance, and not all of the cases will be settled in court," he said on Wednesday.

In another development, a number of green groups, including Jatam and the Indonesian Forum for the Environment (Walhi), have filed a suit against the State Ministry for the Environment at the Jakarta Administrative Court concerning the ministry's environmental assessment of two major mining companies in Sulawesi, PT Meares Sopotan Mining and PT Tambang Tondano Nusajaya. Eight villagers, representatives of residents in North Minahasa district, North Sulawesi, claim the ministry's decision to allow the companies to operate was a violation of regional environmental regulations. The villagers say that the companies' operations will hurt the environment.

Indonesia to Establish \$1bn Climate Fund

27 Januari 2010

Sumber: <http://www.businessgreen.com/business-green/news/2256787/indonesia-establish-1bn-climate>

Indonesia, the world's third largest greenhouse gas emitter, has announced plans for a \$1bn fund to invest in emission reduction projects across the country. Last year, Indonesia made a high profile commitment to cut its greenhouse gases by 26 per cent against business as usual levels by 2020, and the government is now putting

in place a number of policies to help meet the target.

Central to the initiative will be the new Indonesia Green Investment Fund, which will initially be backed by \$100m from the Government Investment Unit, a sovereign wealth fund which will also manage the new fund. Edward Gustely, a senior adviser at the Ministry of Finance in

Jakarta, told Reuters that the plan was to have the fund operational before the end of the year, adding that "there's no reason why this can't, in the next five years, scale to \$5bn or more".

The fund is expected to raise the remaining \$900m from institutional investors and governments from industrialised nations that have

pledged to fund low carbon projects in developing countries. Gustely said the fund will offer top-up funding needed for projects where a bank lender is seeking an additional equity injection. "We would come in and play a catalyst role to ensure good projects with good asset quality, with good expertise and proper management, can be deployed and proceed," he explained.

The fund will invest as much as \$80m in each project, according to its marketing material. Deforestation and forest degradation account for more than 83 percent of Indonesia's carbon emissions, according to WWF, and the fund is expected to largely focus on projects designed to curb deforestation through improved agriculture techniques and reforestation programmes.

Indonesia last year became the first country to launch a legal framework for the UN-backed Reducing Emissions from Deforestation and Degradation mechanism, which aims to integrate forest protection projects into the carbon market, allowing them to generate revenue by issuing carbon credits.

Danone Aqua Lanjutkan Komitmen Sosial di 2010

26 Januari 2010

Sumber: <http://www.detiknews.com/read/2010/01/26/080000/1285999/723/danone-aqua-lanjutkan-komitmen-sosial-di-2010>

Jakarta - DANONE AQUA, penyedia air minum dalam kemasan terkemuka di Indonesia, belum lama ini menyatakan kepada media di Jakarta mengenai kesiapannya menghadapi tantangan di 2010 dengan tetap menjaga kualitas produk yang tinggi, inovasi teknologi dan sistem distribusi serta layanan konsumen yang semakin baik, juga dengan tetap menjaga komitmen pada inovasi sosial. Tahun 2009 menjadi salah satu tonggak sejarah perusahaan karena menjadi tahun yang menandakan dimulainya kampanye berkelanjutan mengenai Kebaikan Alam (*Goodness of Nature*), kesuksesan berkesinambungan program Satu untuk Sepuluh (SuS) di Nusa Tenggara Timur serta peran DANONE AQUA yang semakin signifikan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program CSR.

Pimpinan DANONE AQUA Parmaningsih Hadinegoro pada kesempatan tersebut mengatakan mengatakan, "AQUA telah hadir di Indonesia lebih dari 35 tahun dan sejak awal kami membawa misi untuk menyediakan air minum

dalam kemasan yang sehat dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat dengan memegang teguh komitmen tanggung jawab sosial berkelanjutan. Tahun 2009 merupakan tahun penuh tantangan bagi DANONE AQUA, namun kami telah menjawab tantangan tersebut dengan kontribusi positif kepada masyarakat melalui program CSR berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Kami yakin tantangan akan semakin berat di tahun 2010, namun kami sangat optimis dapat mengubah tantangan tersebut menjadi peluang, tetap dengan komitmen kami menjalankan bisnis sejalan dengan tanggung jawab sosial perusahaan."

2009 menjadi tahun dimana AQUA menorehkan sejarah setelah berhasil meraih dua penghargaan prestisius di bidang pelestarian lingkungan. Penghargaan pertama diperoleh program penanaman kembali hutan Gunung Klabat, Minahasa Utara dimana DANONE AQUA Sulawesi Utara mendapatkan penghargaan Wana Lestari dari Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Yang kedua, DANONE AQUA berhasil meraih penghargaan

MDGs (*Millenium Development Goals*) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Metro TV dalam kategori pelestarian lingkungan (*environmental sustainability*) atas program WASH (*water access, sanitation and hygiene*).

Sustainable Development Director DANONE AQUA Yann Brault mengatakan, "Kedua penghargaan tersebut membuktikan bahwa DANONE AQUA berada pada jalur yang tepat di bidang pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sehingga kami berkomitmen untuk meneruskannya di tahun 2010."

Program-program CSR AQUA berada dalam suatu payung besar yang dinamakan AQUA LESTARI. Di dalam AQUA LESTARI ini, terdapat empat program utama yaitu: (1) konservasi dan pendidikan lingkungan (2) pertanian organik dan manajemen sumber daya air berkelanjutan (3) pemantauan dan pengurangan emisi karbon serta (4) akses air bersih dan penyehatan lingkungan yang biasa disebut sebagai WASH.

Menhut Akan Cabut Hak Kelola Perusahaan Tambang Nakal

25 Januari 2010

Sumber: <http://www.detiknews.com/read/2010/01/25/135132/1285538/10/menhut-akan-cabut-hak-kelola-perusahaan-tambang-nakal>

Jakarta - Kerusakan hutan akibat penambangan dan penebangan liar sudah di luar kendali. Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan akan mencabut izin perusahaan yang tidak mereklamasi hutan konservasi yang diterabasnya. "Banyak perusahaan nakal yang merusak konservasi dan tidak bertanggung jawab. Saya akan mencabut izin perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dalam satu bulan ini," ujar Zulkifli usai pembukaan Taman Wisata Alam (TWA) Kapuk Angke, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Zulkifli mencontohkan, beberapa perusahaan pertambangan telah melewati batas area penambangan dan memasuki wilayah konservasi. "Contohnya di Bangka Belitung dengan bekas galian yang menciptakan lubang-lubang besar. Padahal, perusahaan itu adalah perusahaan raksasa," contohnya.

Dalam beberapa minggu ke depan, Zulkifli akan berkunjung ke beberapa daerah dan perusahaan untuk meninjau langsung kerusakan hutan. Jika ada perusahaan yang terbukti bersalah,

Kementerian Kehutanan akan menghentikan kegiatan operasional mereka. "Misalnya saat ini di Kalimantan sudah ada 156 perusahaan yang dalam penyidikan," jelasnya. Zulkifli juga menyinggung perusahaan yang menggunakan lahan dengan sistem pinjam pakai. "Ada yang menggunakan lahan misalnya di jalan tol dengan sistem pinjam pakai. Masalahnya lahan tersebut dipakai dan dipinjam tapi tidak pernah dikembalikan," pungkasnya.

Perusahaan Rokok Dipaksa Berberkan Formula Rahasia

20 Januari 2010

Sumber: <http://health.detik.com/read/2010/01/20/113036/1282217/763/perusahaan-rokok-dipaksa-berberkan-formula>

Washington - Dari 4.000 lebih bahan kimia yang terdapat dalam rokok, hanya sekitar 60 saja yang benar-benar teridentifikasi peneliti sebagai zat berbahaya dan karsinogenik. Badan pengawas makanan dan obat Amerika (FDA/Food and Drug Administration) pun mewajibkan perusahaan rokok membeberkan secara detail formula rahasia rokoknya demi alasan kesehatan.

Untuk pertama kalinya, FDA mewajibkan perusahaan tembakau membeberkan formula rokoknya dengan detail melalui sebuah undang-undang. FDA akan meneliti sejauh mana formula itu berefek pada kesehatan. Peringatan pada kemasan dinilai FDA tidaklah cukup. Selama ini, perusahaan rokok banyak yang menggunakan campuran bahan cocoa, kopi, mentol dan zat aditif lainnya untuk memberi cita rasa yang lebih enak pada rokok. Namun banyak diantara mereka yang tidak

melaporkan kandungan tersebut dan merahasiakannya pada FDA.

Melalui undang-undang yang rencananya diterapkan Juni 2011, FDA akan mempublikasikan daftar formula dan memberikan informasi pada publik mengenai racikan mana yang tidak berbahaya, berbahaya atau membuat candu. "Produk tembakau adalah satu-satunya produk konsumsi manusia yang kita tidak benar-benar tahu apa saja didalamnya," ujar Lawrence R. Deyton, direksi FDA, seperti dilansir Health24.

Para produsen rokok mengatakan produk mereka berisikan tembakau, air, gula pemanis buatan serta sedikit bahan kimia semacam *diammonium phosphate* (bahan yang digunakan untuk mengatur kecepatan bakar dan rasa) dan *ammonium hydroxide* (untuk meningkatkan cita rasa).

Pada penelitian ilmiah menyebutkan bahwa bahan-bahan

kimia tersebut bisa membuat tubuh menyerap nikotin lebih cepat. Dan hal itu sudah menyebabkan kematian ribuan orang. Tiap tahunnya, Centres for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika melaporkan 443.000 kasus kematian akibat rokok.

Peningkatan pajak, peringatan kesehatan, larangan merokok dan stigma sosial memang berhasil mengurangi angka penjualan rokok, namun penurunan tersebut masih dinilai terlalu kecil. Menurut American Cancer Society, rokok dan asapnya mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, namun hanya 60 bahan yang benar-benar diketahui sebagai zat karsinogenik. "Kenyataannya kita hanya tahu sedikit saja. Sangat sulit jika ingin mengetahui secara akurat bahan mana yang benar-benar berbahaya atau tidak bagi tubuh. Perlu penelitian yang panjang untuk mengetahuinya," kata Dr David Burns dari University of California-San Diego.

Blokir Jalur ke Lokasi Uji Seismik, Warga Tidur di Jalanan

18 Januari 2010

Sumber: <http://surabaya.detik.com/read/2010/01/18/143809/1280798/475/blokir-jalur-ke-lokasi-uji-siesmik-warga-tidur-di-jalanan>

Sumenep - Penolakan warga Sumenep terhadap eksplorasi migas yang dilakukan oleh perusahaan Petroleum Ltd terus berlanjut. Bahkan, warga juga tidur bersama di akses jalan menuju lokasi uji seismik tersebut. Akibatnya, lalu lintas terganggu.

Tidak hanya itu, penolakan warga juga dilampiaskan dengan cara mencabuti patok (tanda lokasi eksplorasi) milik Petroleum, Senin (18/1/2010). Penolakan eksplorasi migas tersebut juga berlangsung serentak di dua lokasi lain yakni di Desa Moncek, Kecamatan Lenteng dan Kecamatan Pragaan. Warga

juga memblokir jalan dan mengusir pekerja Petroleum. Bahkan, anggota komisi B DPRD Kabupaten Sumenep yang akan melakukan kunjungan kerja ke lokasi eksplorasi migas tersebut juga diusir. Mereka menilai anggota dewan tidak memihak pada rakyat. "Rakyat menolak eksplorasi migas karena akan mendatangkan kesengsaraan. Semisal, lumpur Lapindo di Sidoarjo," teriak Hasdanu, selaku koorlap aksi warga Desa Gilang, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura di lokasi.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD

Kabupaten Sumenep, Bambang Prayogi mengatakan, pihak Petroleum telah menghentikan uji seismik sejak hari ini. "Kabar yang saya terima, pihak perusahaan migas telah menghentikan eksplorasi migas. sebelum ada persetujuan dari warga setempat, maka aktivitas uji seismik itu tidak boleh dilanjutkan," terang Bambang di depan warga Desa Gilang, Kecamatan Bluto, Sumenep. Dia juga berjanji akan memanggil semua pihak, sehingga tidak ada diskomunikasi soal eksplorasi migas tersebut yang selama ini mengarah pada perilaku anarkis

Indonesia Siap Sambut ISO 26000

11 Januari 2010

Sumber: http://koran.republika.co.id/koran/123/101156/Indonesia_Siap_Sambut_ISO_26000

Jakarta - Kalau tidak ada aral melintang, September 2010 mendatang akan segera dikeluarkan pedoman pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) oleh International Organization of Standardization (ISO) dalam bentuk ISO 26000. Tepatnya panduan ini bernama *ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO ini menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik maupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju.

Kehadiran ISO 26000 diyakini akan makin memacu perusahaan-perusahaan di dunia, termasuk Indonesia, untuk ber-CSR secara benar. Dengan adanya panduan,

maka perusahaan akan makin mudah dalam menerapkan konsep

CSR. Harus diakui bahwa selama ini tidak ada panduan tentang pelaksanaan CSR. Akibatnya banyak perusahaan yang menginterpretasikan konsep sesuai dengan pemikiran masing-masing. Akibatnya banyak yang melakukan kegiatan CSR hanya dipermukaan saja tanpa menyentuh substansi. Misalnya, hanya dengan melakukan kegiatan filantropi atau *charity* semata. Padahal, lingkup CSR jauh lebih luas dari hanya sekadar filantropi.

Dalam rancangannya, ISO 26000 memuat prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang meliputi kepatuhan kepada hukum, menghormati instrumen atau badan-badan internasional, menghormati para pemegang peran [*stakeholders*] dan kepentingannya,

akuntabilitas, transparansi, perilaku yang beretika, melakukan tindakan pencegahan; dan menghormati dasar-dasar hak asasi manusia Dengan ISO 26000,

kepedulian terhadap kelestarian lingkungan akan menjadi bagian integral dalam setiap kebijakan yang diambil dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai visi dan misinya serta mendukung kesuksesan pelaksanaan pembangunan.

Salah seorang anggota *working group* dari Indonesia yang juga Direktur Eksekutif Eka Tjipta Foundation, Timotheus Lesmana, mengungkapkan, saat ini pembahasan ISO 26000 sudah sampai pada tahapan draft international standard (DIS). Pada Mei 2010 mendatang akan dilakukan pembahasan *working group* dari sejumlah negara di Copenhagen, Denmark. Jika pertemuan tersebut mulus, maka pada September 2010 ISO 26000 sudah bisa dipublikasikan. Apabila ini terjadi, maka untuk merampungkan ISO ini dibutuhkan waktu sekitar lima tahun. Sebab pembahasannya sudah mulai dilaksanakan pada 2005 lalu."

Pembahasannya cukup alot karena ada komitmen bersama dalam pengambilan keputusan tidak boleh voting. Jadi harus berdasarkan konsensus. Lagi pula ISO ini sangat unik karena melibatkan enam stakeholder, yaitu pemerintahan, kalangan industri, konsumen, LSM, karyawan, dan akademisi. ISO yang lain tidak pernah melibatkan sebanyak ini *stakeholdernya*," katanya kepada Republika, pekan lalu.

Jika ISO ini sudah diluncurkan, lanjut Timotheus, akan berdampak positif pada pelaksanaan CSR di dunia, termasuk di Indonesia. Untuk itu, pihaknya yang juga sebagai pengurus tetap CSR di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membentuk kelompok kerja (pokja) yang bertugas menyusun standar dan pedoman CSR di Indonesia. Ini tentu saja akan mengacu pada ISO 26000. Ketentuan dalam ISO nantinya masih bersifat global. Hal itu akan dijabarkan secara lebih

teknis dalam panduan yang akan disusun Pokja. "ISO 26000 sifatnya sukarela. Jadi tidak ada paksaan bagi perusahaan untuk mendapatkannya. Tapi saya yakin akan banyak perusahaan yang akan mendaftarkan diri guna memperolehnya. Sebab ini akan berpengaruh terhadap pasar perusahaan tersebut. Karena itu kami akan susun pedoman dan standar pelaksanaan CSR di Indonesia agar memudahkan bagi para perusahaan," jelas Timotehus.

Indonesia Siap

Lalu bagaimana dengan kesiapan kalangan dunia usaha di Indonesia untuk menghadapi penerapan ISO 26000? Timotehus optimistis dunia usaha di Tanah Air sudah siap untuk melaksanakan itu. "Saya yakin dunia usaha sudah siap. Tapi memang perlu tahapan-tahapan. Jadi tidak seluruhnya langsung bisa dilaksanakan. Dan saya yakin ISO ini akan makin memajukan pelaksanaan CSR di Tanah Air," paparnya Optimisme yang sama

juga disampaikan *Vice President CSR* PT Bakrie Sumatera Plantations, Suwandi. Menurutnya, pihaknya sudah siap melaksanakan ketentuan yang nantinya tertuang dalam ISO 26000. "Kami sudah siap melaksanakan ISO 26000 nantinya. Secara internal tidak ada masalah," katanya.

Menurut Suwandi, setelah ISO keluar akan ada sosialisasi dari pemerintah. Pihaknya akan mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan. "Selama ini kami sudah melaksanakan CSR. Jadi dengan adanya ISO ini akan makin memantapkan program CSR yang telah kami jalankan," imbuh Suwandi. Dia juga merasa optimistis, dengan penerapan ISO 26000, maka pelaksanaan CSR di Indonesia akan makin maju lagi. Sebab sudah ada pedoman yang bisa dijadikan pegangan oleh kalangan dunia usaha untuk melaksanakan kegiatan CSR nya. "Saya yakin nanti CSR di Tanah Air ini akan lebih maju lagi." tuturnya.

Companies Post Glossy Green Claims to Gain more Profit

6 Januari .2010

Sumber: <http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/06/companies-post-glossy-green-claims-gain-more-profit.html>

A fancy five-star hotel gives guests the choice to infrequently change towels because it's environmentally friendly. A property development dons a big banner reading it's a "green project" because it's planting trees. Or a supermarket claims it is environmentally friendly by selling reusable grocery bags.

Don't be fooled. As the globe warms and the issue of environment becomes more prominent, producers in Jakarta are claiming to be green to win customers. There is an increasing practice of "greenwashing," where companies market products and services using misleading or false environmental claims.

The term greenwashing is taken from whitewashing, meaning to hide, cover or conceal unpleasant facts and details, or manipulate. "It's misleading. They're smart because they take advantage of the feel-good factor. "But the foundations don't change," architecture lecturer and green activist Elisa Sutanudjaja said.

Elisa said property developers used this method. She said developers proclaimed they were green because they planted trees. This was not enough, according to Elisa. For properties to make green claims, constructions should be energy efficient, areas should support public transport and there

should be water catchment areas, among others.

Elisa said that a property developer from the Green Building Council Indonesia was developing an elite housing complex in former unused land in North Jakarta. The properties have basements connecting to each other, Elisa said. "It used to be land that could absorb water. The basements will impact on water-catchment areas, which contributes to flooding," she said.

Other greenwashing methods are sponsoring green events such as replanting mangrove forests, but not changing production practice to be more environmentally friendly.

Komunitas Greenlifestyle volunteer Marc-Antoine Dunais said the abundance of "green" messages was positive. "It means companies consider 'green' a selling point for their products and services, providing an opportunity to improve corporate practices, reducing environmental impacts and changing consumer behavior. "The devil, as usual, is in the details," he said.

He said that greenwashing was a problem because it abuses consumer trust and reduces incentives for other companies to make honest, credible environmental claims. "Most importantly, it gives consumers the illusion that there is some kind of 'go green' revolution and our environment is better for it," he said. "Yes, there is a 'green' information revolution, but we should be looking at results. "Is

there less waste and pollution? Are ecosystems in better conditions? Is there more environmental justice?

"These are the questions we need to be asking, especially as we are in a jurisdiction where there is no 'watchdog' agency to monitor green claims and make companies accountable," he said. A group called Indonesia Bergerak (Indonesia Move) said that it's currently attempting to create a consumers' movement for products that promote sustainability and social justice. "We're pushing forward because we realize that consumers need to be active in making change," Indonesia Bergerak chief Tejo Wahyu Djatmiko said.

The group is publishing a bi-monthly free magazine on "green" consumption. Tejo said the group wanted to encourage ethical consumers. "Our consumerism is on

a dangerous level. It's driven by want, not need," he said. Indonesian Consumer Protection Foundation (YLKI) chairman Husna Zahir said consumers should be more aware about their right to be informed. Indonesian Center For Environmental Law Rino Subagyo said it was possible to sue companies that made false environmental claims on their products. Husna said there should be a body that could rate whether a product was in line with their "green" claims.

In the US, there are organizations that provide an index on greenwashing. Indonesia does not. Husna said consumers currently understand their rights to safe products, but they did not understand their rights to products produced sustainably. "This needs to change," she said.

Pemerintah Harus Evaluasi Freeport Sebagai Pengelola Bandara

4 Januari 2010

Sumber: <http://www.detiknews.com/read/2010/01/03/173822/1270714/10/pemerintah-harus-evaluasi-freeport-sebagai-pengelola-bandara>

Jakarta - Tindakan PT Freeport Indonesia yang menolak mengisi BBM pada pesawat Garuda Indonesia dinilai tidak profesional. Pemerintah seharusnya mengevaluasi izin PT Freeport sebagai pengelola Bandara Mozes Kilangin, Timika. "Freeport sangat tidak profesional. Izinnya harus dipertimbangkan," ujar pengamat penerbangan Alvin Lie kepada detikcom, Minggu (3/1/2010).

Menurut Alvin, Freeport seharusnya tidak mencampurkan urusan personal masalah presiden

direktornya dengan peran Freeport sebagai pengelola BBM di Bandara Timika. "Kan ada mekanisme penyelesaiannya. Garuda kan melayani urusan publik," ujar eks anggota DPR dari PAN ini.

Alvin mengatakan, pemerintah bisa melakukan audit investigatif jika memang alasan Freeport tidak melayani Garuda dengan alasan stok BBM terbatas. Freeport seharusnya bisa memperkirakan kapan bahan bakarnya habis. "Kan bisa diperhitungkan kalau sampai sana ternyata habis BBM. Freeport bisa menginformasikan kepada

Garuda kalau stok BBM terbatas sebelum mendarat," ungkapnya.

Sebelumnya, Garuda menyatakan bahwa pesawatnya, GA 652, ditolak mendapatkan BBM -- yang dikelola Freeport -- saat berada di Bandara Timika. Garuda mengaitkan hal ini dengan penolakan pilot pesawat tersebut pada rombongan Presdir Freeport yang mengantongi tiket GA 653 saat pesawat berada di Jayapura. Garuda lantas mengisi avtur ke Biak. PT Freeport menyangkal tidak memberi avtur pada Garuda. Yang benar, stok BBM-nya terbatas. (gus/nrl)

CSR Tidak Cukup dengan Investasi Sosial

Jalal

Aktivis Lingkar Studi CSR

Darul mafasid muqaddam ala jalbil mashalih

"A Tale of Two Companies"

"Untuk apa melakukan program-program sosial di masyarakat, kalau mereka tetap memprotes perusahaan?" demikian pertanyaan yang kerap diungkapkan oleh manajemen kepada penulis. Pertanyaan yang sama juga kerap dihadapi oleh para manajer CSR. Yang juga mirip adalah pernyataan seorang akademisi yang secara sembrono menyatakan bahwa CSR itu sama sekali tidak terkait dengan *social license to operate*. Selidik punya selidik, yang dia maksud juga demikian, bahwa program-program sosial yang dilakukan perusahaan yang dia teliti ternyata tak juga mendatangkan dukungan dari masyarakat buat perusahaan. Apa yang salah di sini?

Sebuah perusahaan tambang yang diteliti secara kasual oleh penulis menjelaskan apa yang terjadi. Program sosial mereka bukannya sedikit. Kalau dibandingkan dengan kebanyakan perusahaan, jumlah sumberdaya finansial dan manusia, juga curahan waktunya jauh di atas rata-rata industri seukurannya. Ada cukup banyak juga penghargaan yang telah diterima perusahaan itu di tingkat nasional. Namun, ada segelintir masyarakat yang terus-menerus melakukan protes kepada perusahaan, lantaran perusahaan tersebut dinilai membuat polusi udara dan polusi suara. Lantaran hanya minoritas anggota masyarakat yang protes, perusahaan tampaknya menganggap dirinya tak dalam kondisi risiko yang tinggi. Namun, mereka yang mengurus "CSR" di situ kerap dipersalahkan, karena tak bisa "membungkam" protes dengan program-program sosial yang telah dibuatnya.

Pada kasus kedua, yang diungkapkan oleh si akademisi, yang terjadi adalah sebuah perusahaan migas yang "gemar" mencemari laut. Telah berkali-kali media massa nasional memberitakan kasus pencemaran laut di tempat perusahaan itu beroperasi. Pantas saja kalau kemudian masyarakat nelayan yang tinggal di pantai-pantai yang relatif dekat, dan mencari ikan, udang, dan cumi-cumi di perairan sekitar anjungan lepas pantai perusahaan itu kemudian dongkol luar biasa. Laut yang tercemari oleh tumpahan minyak tentu saja bukan laut yang mengandung banyak tangkapan. Para nelayanpun kehilangan sementara sumber pendapatan utamanya, sementara bantuan sosial dari perusahaan tersebut untuk mereka tidak bisa

menggantikan kerugian yang diderita akibat menyusutnya tangkapan. Ironisnya, perusahaan berpikir bahwa masyarakatlah yang cerewet, sudah mendapatkan bantuan sosial namun "tak tahu berterima kasih."

Berbagai Kesalahan

Luc Zandvliet dan Mary Anderson dalam bukunya *Getting It Right, Making Corporate-Community Relations Work* (2009) secara tepat menggambarkan akar masalah tersebut. Banyak perusahaan yang memang memiliki anggapan bahwa investasi sosial berupa program-program bantuan yang ditujukan untuk masyarakat adalah sama dengan CSR, dan seharusnya membuat perusahaan cukup untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Padahal, investasi tersebut seharusnya dipandang sebagai salah satu saja bagian dari CSR untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas, terutama pemangku kepentingan.

Mengapa hanya salah satu? "Perbuatan baik" kepada masyarakat tentu saja adalah baik, namun perbuatan yang dilatarbelakangi oleh pamrih untuk mendapatkan dukungan bisa jadi salah kaprah, terutama kalau berbagai dampak negatif operasi perusahaan terus-menerus dirasakan oleh masyarakat tersebut, dan tak ada tanda-tanda kecenderungan menurun dari waktu ke waktu. Jadi, sebelum investasi sosial dilakukan, sebetulnya yang terutama harus dilakukan adalah meminimumkan, kalau bukan malahan menghilangkan, dampak negatif operasi perusahaan.

Ada banyak sekali kesalahan perusahaan terhadap masyarakat, terutama yang dilakukan oleh industri ekstraktif. Penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat operasi perusahaan di banyak tempat berarti hilangnya sumber penghidupan. Seperti yang diceritakan dalam kasus kedua, tumpahan minyak membuat masyarakat nelayan tak bisa memperoleh hasil tangkapan sebagaimana yang biasa mereka peroleh. Sebagai nelayan, kesejahteraan mereka sangat bergantung pada berapa jumlah dan jenis tangkapan mereka. Ketika tangkapan menghilang, tentu saja pendapatan harian mereka anjlok. Dan, karena tumpahan minyak tak kunjung dibersihkan, dalam beberapa hari masyarakat kehilangan penghasilan. Ketika ini terjadi berkali-kali, yang kemudian juga hilang adalah kesabaran masyarakat.

Kasus pertama tak separah yang kedua. Tak sampai masyarakat kehilangan sumber penghidupan. Namun, rasa tak nyaman yang terus-menerus tentu saja akan membuat masyarakat memprotes perusahaan. Perusahaan berkilah bahwa tak ada regulasi yang mengatur jarak antara pemukiman penduduk dengan operasi perusahaan. Namun, pengukuran desibel kebisingan memang melampaui ambang batas. Pada saat-saat tertentu, terutama di musim kemarau, debu dengan sangat mudah disaksikan masuk ke perumahan warga. Ketika debu dan bising datang sekaligus, agaknya wajar saja kalau masyarakat protes. Ada atau tidaknya regulasi tidaklah relevan di sini, karena dampak nyata memang mereka rasakan.

Dari Kesalahan menuju Perbaikan

Apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan ketika berhadapan dengan situasi seperti ini? Seperti yang telah ditunjukkan di kedua kasus, menambah program sosial tampaknya tak akan berhasil, karena memang bukan di situ akar masalahnya. Sangat jelas, bahwa keluhan masyarakat itu harus diselesaikan dengan perbaikan kinerja lingkungan perusahaan. Pada kasus pertama, bagaimana caranya perusahaan memastikan bahwa debu dan bising tak sampai ke rumah penduduk; pada kasus kedua, bagaimana caranya perusahaan menghentikan 'hobi' mencemari laut dengan tumpahan minyak.

Sangat penting untuk disadari bahwa masyarakat melakukan protes secara demonstratif hampir selalu dilatarbelakangi oleh mampetnya saluran komunikasi yang wajar. Kebanyakan perusahaan di Indonesia hingga sekarang tak memiliki apa yang disebut sebagai *grievance mechanism* atau mekanisme (penyelesaian) keberatan. Masyarakat tak tahu dan atau tak bisa mendapati pihak yang tepat untuk diajak bicara dan bisa menyelesaikan keluhan mereka. Banyak perusahaan yang menempatkan penjaga keamanan dengan wajah garang ketika masyarakat datang untuk menyampaikan hal yang menjadi perhatiannya. Tak bisa mendapati jalan masuk yang memadai, masyarakatpun meradang. Memang tak selalu begitu ceritanya, karena para penunggang bebas (*free rider*) pun kerap bergentayangan. Namun, penunggang bebas tak akan dengan mudah menunggangi masyarakat kalau manajemen perusahaan memang bisa diakses secara mudah oleh masyarakat.

Kalau mekanisme tersebut sudah ada, maka masyarakat akan bisa melihat apakah perusahaan memang cukup terbuka untuk menangani keluhan mereka. Mereka akan bisa menilai apakah keluhan mereka benar-benar diterima oleh pihak yang tepat, juga mereka bisa mengetahui kerangka kerja dan

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan keluhan itu. Perusahaan yang terbuka akan dengan senang hati memberi tahu kapan—dan ini artinya segera—penyelidikan akan dilakukan, dengan siapa saja—tentu, dengan pihak-pihak yang berkompeten dan juga perwakilan masyarakat yang mengeluh—penyelidikan itu dilakukan, apakah keluhan tersebut benar-benar merupakan dampak operasi perusahaan, dan apabila benar bagaimana tindak lanjutnya. Kalau perusahaan terbukti memang melakukan kesalahan sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat, maka penghentian kesalahan adalah hal yang niscaya.

Tentu, perusahaan yang pernah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat tidaklah layak hanya menghentikan kesalahan itu. Permintaan maaf secara terbuka, dengan menyatakan kesalahan yang telah dilakukan akan sangat dihargai oleh masyarakat. Ada banyak perusahaan yang telah berbuat salah, namun tak pernah secara terbuka mengakui kesalahan dan meminta maaf karena "gengsi," dan hingga kini tetap menghadapi masalah dengan masyarakat. Norma masyarakat universal tampaknya memang menghendaki pihak yang bersalah untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka. Apa yang dilakukan Kevin Rudd, Perdana Menteri Australia, dengan menyatakan bahwa Australia pernah bersalah kepada warga Aborigin adalah suatu "pertunjukan" moral yang luar biasa. Tampaknya, perusahaan perlu untuk mengingat itu, yaitu bahwa seorang kepala pemerintahan-pun bersedia meminta maaf atas nama negara, di hadapan tatapan mata seluruh dunia.

Mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah perbuatan ksatria. Dan yang lebih penting lagi, perbuatan itu akan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Suatu kondisi *trust* yang negatif, tak bisa sekonyong-konyong dibuat positif. Masyarakat harus belajar kembali untuk mempercayai perusahaan, dan hanya perbuatan ksatria mengakui kesalahan dan meminta maaf sajalah yang bisa membuat masyarakat memulai hal tersebut.

Hal yang kemudian penting dilakukan oleh perusahaan adalah menghitung dengan saksama—bersama-sama dengan masyarakat yang dirugikan dan pihak yang mereka percaya—berapa sesungguhnya nilai kerugian yang diderita oleh masyarakat selama periode kesalahan perusahaan itu. Kalau kemudian nilai kerugian telah diketahui, maka perusahaan harus menunjukkan itikad untuk mengganti kerugian yang diderita oleh masyarakat itu dengan kepantasan. Kembali ke kedua kasus, boleh jadi perhitungan tak akan mudah untuk kasus-

kasus tertentu. Debu dan bising tentu tak bisa dihitung dengan eksak. Ada rasa tidak nyaman yang dirasakan penduduk, ada pula sakit terkait dengan pernafasan dan pendengaran. Mungkin bisa ditawarkan pemeriksaan dan pengobatan kepada masyarakat yang terkena itu. Namun, di luar itu semua, kesan mengenai keseriusan perusahaan dalam menangani hal itu yang akan bisa membuat kepercayaan masyarakat mulai tumbuh lagi. Dalam kasus kedua, penghitungan kerugian akan lebih mudah, karena bisa didasarkan pada rata-rata penghasilan perhari dalam musim tersebut dikalikan dengan jumlah hari di mana laut tercemar.

Begitu kepercayaan masyarakat mulai bisa dipulihkan, barulah perusahaan bisa memulai lagi melakukan berbagai program sosial dengan hasil yang mungkin memuaskan. Masyarakat tidak akan beranggapan bahwa perusahaan berusaha "membeli" mereka, karena pengakuan atas kesalahan di masa lampau telah dinyatakan dengan tegas. Jadi, program sosial dalam kondisi tersebut akan dinilai sebagai bentuk niat baik (*goodwill*) perusahaan, bukan suap.

Persepsi bahwa perusahaan memiliki niat baik sangatlah penting bagi kesuksesan CSR. Masyarakat kini telah dengan cerdas bisa membedakan antara perusahaan mana yang benar-benar tulus dan mana perusahaan yang berakal bulus dalam menjalankan program sosialnya. Tanda terpenting, dalam benak masyarakat, adalah apakah perusahaan benar-benar berupaya meminimumkan dampak negatifnya dahulu. Kalau masyarakat bisa percaya bahwa perusahaan memang tulus, maka penerimaan atas program sosial akan lebih mudah diperoleh.

Namun demikian, argumentasi yang menyatakan bahwa penerimaan masyarakat atas program sosial merupakan tanda telah pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan bisa jadi salah. Kepercayaan masyarakat memang akan lebih memudahkan penerimaan, namun penerimaan belumlah tentu merupakan tanda kepercayaan. Banyak kasus menunjukkan pragmatisme dari masyarakat. Mereka bisa menerima program sosial dari perusahaan karena memang mereka membutuhkannya. Di sisi lain, mereka tak bisa juga melupakan kesalahan yang dibuat oleh perusahaan dan belum diselesaikan. Logikanya sama dengan himbuan dalam menghadapi politik uang "ambil uangnya, namun jangan pilih orangnya." Dalam hal ini, penerimaan masyarakat atas program sosial tidaklah menghapus kesalahan perusahaan, melainkan tanda bahwa masyarakat memang membutuhkannya.

Kalau kemudian perusahaan telah mengakui kesalahan dan secara terbuka meminta maaf kepada

masyarakat, maka yang penting dilakukan kemudian adalah menjaga jangan sampai kesalahan yang sama kembali berulang. Pada kasus pertama, perusahaan bisa melakukan banyak hal untuk memastikan hal tersebut. Walaupun tak ada regulasi yang mengharuskan, perusahaan bisa menanam berbagai spesies perdu atau pohon yang bisa menapis debu dan mengurangi kebisingan. Lebih jauh daripada itu, perusahaan mungkin perlu untuk memastikan jarak aman antara operasinya dengan pemukiman. Ini bisa dilakukan dengan memindahkan penduduk ke jarak yang aman. Tentu saja, pemindahan penduduk harus dilakukan dengan hati-hati sebagaimana misalnya yang ditunjukkan dalam *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP) yang merupakan persyaratan IFC atau lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan internasional lainnya. Sementara pada kasus kedua, perusahaan migas itu benar-benar perlu menghentikan 'hobi' mencemari laut, sekuat mungkin meningkatkan pengawasannya pada hal-hal yang selama ini mengakibatkan tumpahan.

Setelahnya, perusahaan bisa melakukan berbagai program sosial, yang tentunya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, rancangan program yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi (juga pada 'tahap' menikmati hasilnya, sebagaimana pendirian Profesor Sajogyo) harus dibuat dengan sungguh-sungguh. Perusahaan perlu melakukan *community needs assessment* dengan metodologi partisipatori yang kokoh, atau program yang dibuat hanya akan terkait dengan sedikit saja kebutuhan masyarakat. Boston College Center for Corporate Citizenship menyadari bahwa sebagian besar program sosial oleh perusahaan masih terlampau sedikit mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Karenanya, di awal 2010 ini mereka menyelenggarakan webinar (seminar melalui dunia maya) bertepatan "So many corporate-community partnerships, so little value. Until Now." Penulis sangat yakin, bahwa pada akhir webinar itu kelak, salah satu penyebab yang diidentifikasi adalah perusahaan tidak mau berinvestasi dalam melakukan penilaian kebutuhan masyarakat

Hanya dengan melakukan seluruh hal di ataslah masyarakat akan semakin percaya bahwa perusahaan memang sungguh-sungguh menjalankan CSR yang lengkap, yaitu CSR sebagai manajemen dampak yang komprehensif: dampak negatif diminimumkan, dampak negatif residual dikompensasi, dan dampak positif dimaksimumkan.

Akhirul Kalam

Michael Blowfield dan Jorge Frynas di tahun 2005 menulis dalam *Setting New Agenda: Critical Perspectives of Corporate Social Responsibility in the*

Developing World (International Affairs 81/3, 2005). Di situ mereka menyatakan ketidaksetujuannya pada pendirian Archie Carroll yang menyatakan bahwa CSR berkembang sejak 1953 setelah Howard Bowen meluncurkan buku *Social Responsibilities of the Businessman*. Mereka berpendapat bahwa CSR jauh lebih tua daripada itu. Selain berhutang dasar pemikiran pada filsafat Yunani, CSR juga berhutang

pada aturan agama Kristen dan Islam. Dalam Islam, terdapat kaidah *ushul fiqh* (metodologi jurisprudensi Islam) bahwa mencegah kerusakan harus diprioritaskan di atas berbuat kebaikan—yang bahasa Arabnya dikutip di bagian awal tulisan ini. Kiranya, kaidah tersebut adalah salah satu nilai agama yang penting dipegang sebagai dasar pemikiran CSR arus utama.

Gusur Paksa Atas Nama “Kepentingan Negara”

Jalal

Aktivistis Lingkar Studi CSR

Kalau agenda besar dan “seksi” sedang dimainkan, maka biasanya agenda yang secara politis kurang signifikan lolos dari pandangan mata kebanyakan orang. Karena kita semua disibukkan oleh perseteruan buaya versus cicak, skandal Bank Century, dan belakangan soal Gurita Cikeas, maka sebuah agenda yang diusung Pemerintah RI melalui Departemen Pekerjaan Umum-pun bisa melenggang mulus. Agenda tersebut adalah kehendak Pemerintah untuk mencabut hak individu atas tanah dengan dalih Hak Menguasai (oleh) Negara, apabila “negara” membutuhkannya untuk pembangunan infrastruktur.

Walaupun secara politis, setidaknya hingga tulisan ini dibuat, kehendak Pemerintah itu tidak dianggap penting, sehingga tak satupun partai menyoroti masalah ini, namun dipastikan bahwa ke depan agenda tersebut akan menuai banyak masalah. Betapa tidak, kalau rencana tersebut benar-benar terwujud, maka akan ada banyak sekali warga negara ini yang akan terkena dampaknya. Dampak utama di Pulau Jawa mungkin adalah dampak ekonomi, namun di pulau-pulau lain, sangat boleh jadi akan ada dampak sosial-kultural yang juga sangat besar.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah lama sekali menimbulkan kontroversi. Ketika penjajah Belanda membangun jalan raya Anyer-Panarukan, penggusuran dilakukan. Namun, karena pada waktu itu jumlah penduduk masih sedikit, maka jumlah warga yang tergusur tidaklah besar. Namun, “hobi” menggusur kemudian diwarisi oleh Pemerintah RI yang konon dibuat untuk mensejahterakan masyarakat itu. Dengan dalih “kepentingan pembangunan nasional”, kita menyaksikan puncak pengabaian hak individual atas properti di jaman Orde Baru. Untuk membangun jalan, jembatan, bendungan dan lain-lain, penggusuran dengan berbagai tekanan dilakukan. Todongan senjata, penculikan, penyerbuan oleh aparat militer adalah cerita-cerita jamak yang terdengar di masa itu.

Ketika reformasi menjelang lalu datang, kesewenangan seperti itu kemudian menyusut. Keadilan tampaknya lebih dekat dengan jangkauan tangan rakyat. Namun, harga yang harus dibayar adalah bahwa berbagai pembangunan infrastruktur—yang memang dibutuhkan negeri ini—menjadi lebih lama. Negosiasi yang telat tanpa tekanan—walau masih banyak mengandung tipuan—telah membuat masyarakat berani untuk meminta harga yang pantas untuk properti yang harus mereka relakan berpindah tangan.

Pemerintah yang tampaknya mulai gerah dengan kondisi ini. Malaysia adalah negara yang kerap dijadikan rujukan pembicaraan. Negeri jiran tersebut membangun infrastruktur besar-besaran, terutama jalan, jauh lebih cepat daripada Indonesia. Mereka yang belakangan memulai pembangunan, ternyata bisa menyelesaikan pembangunan jalan yang lebih panjang dalam dekade terakhir. Kalau dihitung sejak awal Malaysia membangun jalan tol, mereka telah menyelesaikan 1600 km; sementara pada periode yang sama Indonesia cuma bisa menyelesaikan 600 km (Damardhono, 2009). Keberhasilan itu diakui dunia internasional. Bahkan, ketika India memiliki rencana ambisius membangun 20 km jalan per hari, negeri Shah Rukh Khan ini pun berkunjung ke Malaysia, mempelajari rahasia suksesnya sambil membujuk para investor negeri itu untuk menanamkan modalnya di proyek-proyek jalan di India.

Pun demikian dengan para penggode PU negeri ini. Mereka bertekad mempelajari rahasia tersebut. Dalam Program 100 harinya Menteri PU menyatakan akan melakukan “... penajaman regulasi dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. ... insentif bagi camat atau lurah sebagai pejabat pembuat akta tanah yang menjadi ujung tombak pembebasan

lahan. Anggota Panitia Pengadaan Tanah diisi pejabat yang bekerja penuh.” (Damardhono, 2009).

Tentu saja, para pejabat PU dan PT Jasa Marga kemudian menjadi girang bukan kepalang setelah pada 15 Desember 2009 mereka mengetahui bahwa rahasia itu adalah pencabutan otomatis hak individu atas tanah, manakala tempat tersebut dinyatakan sebagai rute jalan tol. Dato’ Ismail bin Md Salleh, Direktur Jenderal Lembaga Lebuhraya Malaysia, mengatakan, “Di Malaysia, begitu rute tol ditentukan, maka hak atas tanah yang akan dilintasi tol itu dicabut. Tegasnya, jalan tol tinggal dibangun, perdebatan hanya soal harga.” (Damardhono, 2009)

Dalam hal yang terakhir itu, yaitu “hanya” soal harga, Malaysia memiliki kebijakan untuk menggunakan penilai tanah yang independen. Hasilnya biasanya adalah harga yang mendekati atau bahkan sama dengan nilai pasar. Kebijakan lainnya, dari harga yang telah ditetapkan penilai tanah, 75% langsung dibayarkan kepada pemilik, sementara 25% lainnya disimpan di pengadilan setempat (dikonsinyasikan), menunggu kesepakatan tercapai. Pemerintah juga menetapkan nilai tanah naik 8% pertahun, sehingga kalau pengadilan berlangsung lama, maka pemilik tidak akan terlampaui dirugikan, karena ada perlindungan atas nilai tanahnya.

Tampaknya, jalan seperti Malaysia itu dianggap benar, dan akan langsung diberlakukan, mumpung bangsa ini sedang terkuras konsentrasinya oleh berbagai masalah lain. Para petinggi PU rupanya lupa bahwa pemangku kepentingan utama dalam masalah ini adalah masyarakat yang akan terkena dampak pengrusakan, bukan Pemerintah Kerajaan Malaysia. Mereka berniat mencontoh kesuksesan tetangga; tetapi melupakan bahwa yang seharusnya diajak berembung adalah saudara sendiri, di tanah air sendiri. Mereka “lupa” bahwa arti partisipasi dalam pembangunan yang sesungguhnya adalah memberikan ruang untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang dampaknya (baik positif maupun negatif) mengenai diri seseorang atau sekelompok orang.

Tampaknya prinsip yang sangat mendasar itu hendak dibuang begitu saja. Bagaimanapun, hak masyarakat untuk mengetahui secara persis apa yang akan mengenai dirinya (*community right to know*) adalah hak normatif yang harus dipegang. Kalau kemudian memang masyarakat diminta untuk melepaskan hak atas propertinya, maka permintaan hak untuk melepaskan itu tak bisa dilakukan semena-mena. Hak mutlak individual atas properti memang ide kapitalisme yang membahayakan, namun pendirian ekstrem etatisme yang mengingkari hak individual juga tak kurang sesatnya.

Yang harus dicari adalah ruang di tengahnya, dan itu adalah konsultasi publik serta negosiasi dengan mereka melalui cara-cara yang bermartabat.

Dalam berbagai standar internasional, sebut saja sebagai misal IFC Social and Environmental Performance Standards, sangat tegas pendirian bahwa hak individual atas properti harus dilindungi dengan cara memastikan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat yang dipindahkan minimal harus sama dengan ketika mereka menempati tempat tinggal asalnya. Dalam hal ini, kesejahteraan bukanlah sekadar istilah ekonomi yang sempit, melainkan juga dalam pengertian sosio-kultural dan ekologis. Agar itu bisa dicapai, maka pengetahuan mendalam mengenai tingkat kesejahteraan harus dimiliki oleh siapapun—swasta atau pemerintah—yang hendak memindahkan penduduk. Jadi, masalah pemindahan penduduk, bukanlah sekadar persoalan harga.

Mungkin pihak swasta di Indonesia akan menarik nafas lega, karena Pemerintah mau menanggung konsekuensi pembebasan lahan, yang berarti perusahaan bisa lepas tangan dari berbagai masalah, kalau memang belakangan muncul. Tapi, benarkah demikian? Tampaknya tidak bisa demikian. Performance Standard 5 dari IFC menyatakan bahwa: “*Where land acquisition and resettlement are the responsibility of the host government, the client will collaborate with the responsible government agency, to the extent permitted by the agency, to achieve outcomes that are consistent with the objectives of this Performance Standard. In addition, where government capacity is limited, the client will play an active role during resettlement planning, implementation and monitoring,...*”

Apa konsekuensi dari tidak memenuhi standar kinerja tersebut? Bagaimanapun, Indonesia bisa menjadi pariah di mata dunia internasional. Kita punya banyak catatan mengenai pelanggaran HAM, dan bisa jadi masalah ini akan menambah deretan panjang catatan itu. Kedua, kalau memang pengrusakan yang dilakukan itu dipandang sebagai pelanggaran HAM, maka perusahaan yang membuat infrastruktur dan juga menggunakan infrastruktur tersebut bisa dianggap melanggar HAM karena mendiamkan dan menikmati hasil pelanggaran. Ketiga, karena standar tersebut sudah menjadi norma penapis investasi global, maka perusahaan swasta yang mau membangun infrastruktur di atas tanah yang diakuisisi dengan melanggar HAM itu tidak akan bisa memperoleh investasi dari IFC, ADB, JBIC dan bank-bank penanda tangan The Equatorial Principles. Jadi, selain risiko reputasi, risiko tak mendapat pembiayaan pun besar—kecuali kalau memang merencanakan untuk memperoleh suntikan

dari lembaga-lembaga keuangan yang menutup mata dari berbagai pelanggaran seperti itu.

Meniru Malaysia dalam hal akusisi lahan untuk pembangunan infrastruktur tidaklah memadai. Lagipula, bukankah kita memiliki banyak masalah

karena negara jiran itu banyak mengabaikan HAM dan kepatutan? Kita musti berpikir dengan jernih apakah mengimpor praktik mereka dalam akusisi lahan itu tak bertentangan dengan HAM dan kepatutan.

Agenda

A+ CSR Indonesia Workshop 201

- Workshop 1. (17 Februari) : Sistem CSR: Pengetahuan Esensial CSR
- Workshop 2. (10-12 Maret) : ISO 26000: *International Guidance on Social Responsibility*
- Workshop 3. (14-15 April) : Penilaian Kinerja Sosial dan Lingkungan
- Workshop 4. (19-20 Mei) : Pemetaan Pemangku Kepentingan untuk Implementasi CSR yang Efektif
- Workshop 5. (16-17 Juni) : CSR Strategik
- Workshop 6. (21-22 Juli) : Manajemen CSR: Solusi Membuat Program CSR Berhasil
- Workshop 7. (22-23 September) : Pelaporan Berkelanjutan
- Workshop 8. (20-21 Oktober) : Pembinaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
- Workshop 9. (23-24 November) : *Community Development*
- Workshop 10. (15-16 Desember) : Membangun Reputasi melalui Komunikasi CSR Efektif

Waktu dan Tempat

Hotel Santika Bogor; Botani Square Jln. Raya Pajajaran, Bogor Jawa Barat. Pukul 08.00 - 17.00 wib.

Investasi

Rp. 2,250,000 (satu hari), Rp. 4,000,000 (dua hari)

Keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi

A+ CSR Indonesia Jln. Danau Sentani Blok C VII No. 9 Duta Pakuan Bogor 16144 Indonesia

Phone: +62 251 8336 349, email: studi@csrindonesia.com

Cohort 15: Call for Participants

LEAD Associate Training on "Green Economy: Strategic Directions in time of Climate Change"



LEAD Indonesia will conduct LEAD Associate Training or LAT of Cohort 15 with a theme "**Green Economy: Strategic Directons in time of Climate Change**", a series of 20-day National Session (17 days intensive workshops and 3 days online/distance learning), and 7-day International Session (Port Elizabeth, South Africa) within the year of 2010. Mid careers from any sector of government, business, NGO, academic, and media, who have a vision to bring about changes, are invited to join this opportunity as LEAD Associate Trainee whom will be the LEAD Fellow after completing the training. Through the training, participants will have the understanding of the problems to encounter the green economy issues in the 21st century, and its relations to climate change impacts and opportunities toward mitigation and adaptation strategy, within sustainable development framework. More than training, the participants will involve in an intensive project, LEAD Associate

Project in a group consists of different backgrounds and expertise, to produce action plan either in policy recommendations, case study, or preliminary research findings toward a large-scale research in the future. The results will be shared among participants, institutions of the participants, and LEAD Indonesia. The best LAP will be imbedded into policy recommendations at the International Session. At the end of the session the

participants will produce a cohort document "Green Economy Strategic Direction: A Policy Recommendation" which will produced through workshop facilitated by experts.

Those who completed the training at national level and meet the passing grade standard will join a network of LEAD Fellows around the globe, consists of around 2000 professionals from various field of work, represent 90 countries. A number of best participants will be sponsored to join international session in South Africa where they will meet participants from other 13 LEAD Program Offices from Canada, Africa, Latin America, Europe, Canada and Asia. In the international session they will learn from the global perspective the issues related to sustainable development, with a focus on climate change. By the end of the international session LEAD Fellows will produce "LEAD Declaration" document as commitment of the participants to sustainable development. This is "energy" that fuels our bodies and minds, inspires us to challenge ourselves and others. Let this cohort 15 theme boosts you up and be ready to bring about change to the sustainable development for a better world!

Please apply for this rare opportunity (seats are limited). **We will really appreciate if you can disseminate the information to the potential candidates.**

Asia's New Free Trade Area: Risks and Opportunities for CSR

Richard Welford

27 Januari 2010

Sumber: http://www.csr-asia.com/weekly_detail.php?id=11927

The abuse of human rights, environmental degradation, pressure on wages, unsafe working practices and pressure on workers to work longer hours are all made more possible by the increased competition as a result of the new Free Trade Area (FTA) in Asia. Yet, the opportunities that come from the FTA also point towards a new mandate for CSR in many countries.

At the beginning of 2010, China and the ten South East Asian nations launched the world's third-largest free-trade area. Tariffs are set to fall on products as diverse as textiles, rubber, vegetable oils and steel. But many companies are nervous about how the increased competition will impact on their markets.

For the pessimists in ASEAN, direct competition could therefore be deadly for some businesses. That is something ASEAN businesses might learn fast as Chinese manufacturers seek to increase exports, unfettered by the duties and tariffs that before 2010, gave local businesses at least some protection.

Trade between China and the ten countries that make up ASEAN has soared in recent years. In 2002 it stood at US\$50 billion, but by the end of 2009 had reached over US\$200 billion. The new FTA, which will remove tariffs on 90 percent of traded goods, is expected to increase that trade still more.

The zone ranks behind only the European Economic Area and the North American Free Trade Area in volume. It encompasses 1.9 billion people and a combined GDP of \$6 trillion. The FTA has been heralded as an opportunity to help ASEAN countries increase exports, particularly those with commodities that resource-hungry China desperately needs.

However, many manufacturers in South East Asia are concerned that cheap Chinese goods may flood their markets, once import taxes are removed, making it more difficult for them to retain their markets. Indonesia is so worried that it is asking for a delay in removing tariffs from items such as steel products, textiles, petrochemicals and electronics.

Under the FTA agreement China, Indonesia, Thailand, the Philippines, Malaysia, Singapore and Brunei will have to remove almost all tariffs in 2010. Cambodia,

Laos, Vietnam and Myanmar will gradually reduce tariffs in the coming years but must eliminate them entirely by 2015. Most of the goods that become tariff-free now, including manufactured items, were previously subject to import taxes of about 5 percent.

In recent years, China has overtaken the United States to become ASEAN's third-largest trading partner after Japan and the EU. The overall trade balance has shifted slightly in China's favour, although there are significant differences among South East Asian countries' trade balances. Singapore, Malaysia and Thailand have small trade deficits with China. But in 2008, Vietnam exported items worth US\$4.5 billion to China but imported about \$15.5 billion worth of Chinese goods.

In Indonesia, the press is full of reports of companies worried about the impact of the FTA on their businesses. Textile related businesses are particularly nervous about lifting tariffs and the subsequent impact of competition with Chinese manufacturers. A price squeeze is being predicted leading to a subsequent need to cut costs and raise productivity. Many worry about precisely how that can be achieved with wafer thin profit margins already and predict a return to abusive and exploitative working conditions.

In Indonesia and elsewhere downward pressure on costs, in order to maintain competitiveness, runs the risk of undoing some of the advances made on the CSR front in recent years therefore. Pressure to produce more at lower prices runs could create downward pressure on the payment of wages (and even minimum wages), pressure on working hours and even the possibility that corners may be cut with respect to health and safety and environmental protection measures.

One analyst I spoke to recently predicted a return to some pretty poor working practices in factories and steel mills in Indonesia unless some tariffs stayed in place. Whilst China does not have the lowest wages in the region, its productivity remains high and the manufacturing sector in countries such as Vietnam and Thailand is also going to experience significant pressure from Chinese imports. A possible "race to the bottom" certainly puts good CSR practices under threat.

There are also considerable concerns over Cambodia's important textile and apparel industry that has been an engine for growth in parts of the country. Few expect Cambodian textile exports to be able to compete with China's highly developed garment industry. On the other hand the FTA might entice more Chinese garment factories to set up operations in Cambodia, where production costs and labour are certainly cheaper. This could create jobs and wealth but whether this will protect the CSR practices encouraged by the ILO's much cited Better Factories Program is more questionable.

Elsewhere the prospect of foreign direct investment from China is seen as even more of a threat. According to the Bangkok Post, for example, China's consumer appliance giant Haier is planning to take advantage of the FTA by investing US\$9 million into its factories in Thailand to churn out more fridges, washing machines and air conditioners. This has led to accusations that such goods might lead to inferior quality, poorer workplace practices and little regard to the environment as buying decisions are made in favour of price over other factors.

On the other hand the pain is not all one way. Many commentators expect China to import more agricultural goods, for example tropical fruit, from countries like Thailand, Malaysia and Vietnam. That could hurt Chinese farmers who are already amongst some of the poorest groups in China.

Whilst competing with more Chinese imports may pose new challenges for ASEAN manufacturers, others also point out that increasing their access to China's market of 1.3 billion people could produce significant benefits. However, those benefits will only materialise if ASEAN manufacturers can offer something cheaper, better or different from what is already on offer in China.

China's growing middle class consumers are increasingly sophisticated in their buying habits and

are often looking for something a bit different. This presents great opportunities for manufacturers outside China to offer something not currently available in the marketplace. Opportunities for niche products abound.

But bigger players can also reap rewards from the new FTA. Malaysian companies, for example, already export agricultural products and natural gas to China and Malaysia is one country that might benefit the most from the removal of tariffs. Crude palm oil from Malaysia, which produces 45% of the global supply, is one commodity for which China has a vast appetite.

However, nations such as Vietnam that focus on the manufacture of cheaper consumer goods are more likely to be hurt. But, they may not be damaged too badly if they can look for new export products and new export markets. And this is where good CSR practices may help them to differentiate themselves from the new competition in the FTA.

2010 is going to be a year when many brands are going to have to be watchful over factory practices that may not live up to their Supplier Codes of Conduct. The economic pressures experienced in 2009 and now the mounting pressure created by increased competition as a result of the FTA is undoubtedly going to lead to some companies to want to cut costs and cut corners.

But most economists also point to the need for companies to aim at niche markets with differentiated products in order to survive and the markets for ethical, green, organic, responsible, natural and socially enterprising products are all on the increase. Products differentiated with CSR in mind might just fine favour in new socially aware marketplaces.

As ever there are risks and opportunities...■

Why the Triple Bottom Line Matters More Than Ever

Mitch Tyson

8 Januari 2010

Sumber: <http://greenbiz.com/blog/2010/01/08/why-triple-bottom-line-matters-more-ever?page=0%2C1>

The conventional way to measure the success of a business is the bottom line. But the concept of a triple bottom line, where social and environmental factors are considered along with economic ones, is also getting a lot of attention. Is this another business fad? Is it a new management technique like total

quality management? I don't think so. I see the triple bottom line as a way to think about yourself, your career, and your company. The essential challenge it poses to business leaders is to find a way to simultaneously please your investors and impress your grandchildren.

Triple bottom line thinking holds that a company should combine standard metrics of financial success with those that measure environmental stewardship and social justice. It is sometimes called the 3P approach -- People, Planet and Profits. In each case it requires thinking in three dimensions, not one. Triple bottom line isn't new. When John Elkington first mentioned it in the mid 1990's, he also laid the groundwork for defining environmental and social impacts of a company's activities. Today, quantifiable environmental impacts include consumption of finite resources, water quality and availability, and pollution emitted. Social impacts include community health, worker safety, education quality, and diversity.

Why think this way? Why adopt such an approach? It is argued by many that companies that factoring these impacts into their overall corporate balance sheets will be more successful because it delivers greater efficiency, makes them more competitive and sparks innovation -- all drivers of profitability over time. But intuitively, doesn't it also just make sense? Don't you want to leave the planet a little better than you found it? Don't you want to work for a company that operates ethically and acts with integrity and cares about the people it employs and serves? Don't you want to make products that really enhance people's lives? Don't you want to help our country become less vulnerable to oil supply disruptions?

We certainly don't measure the success of our families by how much money we have saved. Our family's health, our kid's education, and the amount of love and caring in our family, count as much, if not more, than our financial security. So why do we have to measure the success of our companies with only one metric? Another concept often linked to triple bottom line is that of sustainability. We sometimes speak of adopting sustainable business practices or building sustainable businesses. But what does that really mean?

The best definition I've heard was created in 1987 by the United Nations Brundtland Commission, which defined sustainability as "Meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs." It's a simple, powerful statement. Make sure our decisions today take future costs into account. By adding time it asks us to think in four dimensions and not one.

There is a strong argument that triple bottom line or building sustainable businesses creates more profitable and successful business. Pursuing environmental and social objectives doesn't have to be at the expense of financial objectives and often is reinforcing. Take the desire to reduce the

environmental impact of a building for example. You could just lower the thermostat and make everyone a little more uncomfortable. Or you could do something better and install more efficient lighting. Or you could do something even better and rethink the entire building and design an integrated building that has better ventilation, better lighting, uses much less energy, and is more comfortable.

People who work in LEED-certified buildings typically show 6 percent to 16 percent improved productivity, roughly 10 times the initial energy savings. That becomes a measurable benefit that can ultimately be linked to profitability and shareholder value. What's more, employees feel better about their work environment and their employer, creating stronger employee relationships and company loyalty. One investment in building efficiency yields benefits across multiple dimensions. This is just the beginning. Businesses pursuing sustainability are becoming more efficient, more innovative, more connected, more profitable, and more competitive.

But as in most things, companies go through phases. At first they tend to be defensive and focus on complying with regulations. When they move beyond that, they become tactical -- looking for ways to reduce waste and become more efficient in the way they do things. In the next stage they start to think systematically. Here, a company begins to identify its position in the value chain and explore how their customers use their products and how they dispose of them. They will also explore their supply chain and find out where their raw materials come from and how much energy is used to make them. They will start thinking about their own factories and find ways of using new manufacturing process that use less energy. at AEB, we manufacture an energy efficient, pollution-free technology that allows traditional manufacturing industries to replace antiquated process technologies like thermal ovens.

For example, a large food package printing operation could replace its drying ovens with our electron beams and save millions of BTUs of energy annually, avoid tons of CO2 and VOC pollution. This kind of technology is both more sustainable and more profitable. In driving the adoption of our technology, we've realized it's critical to talk to brand owners and retailers to help them understand how the manufacturing processes of their supply chains impact their own environmental footprint.

Ultimately, progressive business leaders start thinking strategically and see sustainability as a catalyst for new business models. Recently FedEx Kinko's, which has been in the business of delivering packages, started accepting documents electronically

and printing them near where they need to be delivered thus meeting their customer's needs with significantly less energy.

Rosabeth Moss Kantor writes in her recent book about SuperCorps, which embedded the idea of serving society into their business definition and strategy. She cites companies like GE, which focused its mission on helping the world transition to a more sustainable energy infrastructure. I believe that triple bottom line thinking and sustainability are inevitable. To business leaders, these are choices. We can start to make our companies more efficient or wait until costs rise. We can redesign our products for a more sustainable world or we can try to catch up later. We can wait until our customers or the government ask us to report our carbon footprint or we can volunteer it now.

A recent Sloan Business Review survey found that 92 percent of 1,500 executives said that their companies are addressing sustainability, but most said not aggressively. Clearly the door is wide open for leaders to emerge. Business leaders do not need to check their values at the door. Despite media coverage of ethical business lapses and shortsighted business practices, all the CEOs I know want to do the right thing. They want employees to be healthy because they care about them not just because it lowers premiums. They want to reduce pollution from their plants because they live in the community and breathe the air not just because they want to avoid fines. They treat their customers and suppliers fairly because that's the way they want to be treated. They create value for their investors because that's what they were hired to do and that's what they

committed to do, not just because they want their share. They are motivated by their core values.

You can rationalize that the triple bottom line will make your company more successful, which it will, or you could pursue it because it reflects your values as a person. But in some sense to those that will be most impacted it doesn't matter why we do it as long as we do it. Jim Rogers, CEO of Duke Energy, uses something he calls the "Grandparent Test." He runs one of the biggest utilities in the country and has a lot of people counting on him. His customers expect there to be power at the flick of a switch and his investors expect profits every quarter.

But he's focused on what his grandchildren will say to their grandchildren 50 years from now. Will they say he ran the dirtiest utility in the world or that he was the first utility executive to commit to going carbon free? For Rogers, doing well and generating profits aren't mutually exclusive goals; the two are inexorably linked. And in fact many of the Fortune 1000 executives who have started embracing triple bottom line thinking cite their grandchildren when asked why they are doing it. Future generations aren't an abstraction to them any more than revenues or earnings are. The triple bottom line and sustainability aren't new management techniques. They aren't the latest management fads. They are concepts that challenge each of us to balance the way we successfully run our business and the world that our children's children will inherit from us. And we need to start now.

Mitch Tyson is Chief Executive Officer of Advanced Electron Beams based in Wilmington, Mass.

Green Ads Space

Untuk mengiklankan produk yang ramah sosial dan lingkungan, *sponsorship*, link ke laporan CSR perusahaan, agenda kegiatan CSR (pelatihan, seminar, lokakarya, ekspo) atau lainnya yang relevan silakan kontak ke media@csrindonesia.com.